

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004.
- Darmodiharjo, Dardji, *Orientasi Singkat Pancasila*, Jakarta: Gita Karya, 1978.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, cet. 1, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hiariej, Eddy. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- M.D., Moh. Mahfud *Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Oktoberina, Sri Rahayu, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2003.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Simanjuntak, Nikolas, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syafaat, Rahmad, *Dagang Manusia*, Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal:

Takariawan Agus, dan Sherly Ayuna Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 25 Mei 2018.

Makalah:

Eddyono, Supriyadi Widodo, “Problem Implementasi Hak Restitusi Korban Berdasarkan UU No 13 Tahun 2006.” *Makalah*, 2010. Lihat: Draft RUU LPSK Rancangan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Internet:

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>., diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

